BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Undang-Undang perpajakan mewajibkan para wajib pajak (WP) untuk membayar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Namun bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari wajib pajak pribadi terutama badan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Definisi Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) menurut Brown (dalam Wijaya, 2014) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”. Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk

menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Maharani dan Suardana (2014) menyebutkan Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Putranti, Jati dan Tambunan (2015) menyatakan bahwa penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama hampir seluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Industri perbankan Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam menjalankan fungsi intermediernya, potensi penghindaran pajak dalam industri perbankan kemungkinan dapat terjadi dalam konteks : (i) bank sebagai pelaku penghindaran pajak dengan berbagai skema; dan (ii) bank sebagai channel yang digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Dalam pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait praktik *tax avoidance*, adanya kerahasiaan bank (*bank secrecy*) perlu mendapat perhatian penting. Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami keterbatasan dalam pemeriksaan pajak karena kerahasiaan perbankan. Seyogyanya, dengan adanya PER-01/PJ/2015, DJP dapat memperoleh informasi mengenai nasabah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan dan sebagai pasokan data eksternal untuk memperluas basis pajak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan diyakini dapat memicu penarikan dana nasabah dan memindahkan dana tersebut ke luar negeri (Putranti et al.2015).

Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghindaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku misalnya: (i) penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (*interbank loan*); (ii) penahanan dividen kepada pemilik saham (*branch profit tax*); dan (iii) pembukaan cabang di negara yang digolongkan sebagai *tax haven countries*. Skema praktik penghindaran pajak yang memungkinkan terjadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana bank merupakan *channel*, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman (Putranti et al.2015).

Sebagian besar bank-bank swasta nasional maupun bank pemerintah yang memiliki cabang di luar negeri hanya berfungsi *remittance*. Selain itu, pembukaan kantor cabang di luar negeri adalah untuk mendapatkan dana murah. Sebagai contoh tahun 2016 lalu perpajakan dunia di hebohkan dengan munculnya dokumen Panama Peppers. Diketahui, dokumen tersebut menguak praktik penyembunyian aset dan penghindaran pajak yang diduga dilakukan sejumlah pengusaha, politisi, hingga olahragawan. Hal menarik yang diungkap lainnya adalah bagaimana praktik penyembunyian aset dan penghindaran pajak modusnya dengan mendirikan perusahaan ‘cangkang’ (*shell corporation*) di negara-negara yang dikenal dengan surga bebas pajak (*Tax Haven*). (NNP, 2016)

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiono, 2012). Hal ini sesuai dengan Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa (2012) yang menyatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar (Surbakti, 2012). Menurut Maharani dan Suardana (2014), profitabilitas yang diukur dengan ROA (*Return of Asset*) mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Setiawan (2010) dalam Suyanto (2012) menyebutkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2009, tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Agusti (2014) *leverage* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setiono, 2012). Hal ini sesuai dengan Khurana dan Moser (2009) dalam Annisa (2012) yang menyatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*, dengan mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka di tetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI secara parsial?
2. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI secara simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara empiris, penelitian ini akan menguji apakah profitabilitas, *leverage*, dan karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance* diperusahaan, khususnya perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dengan adanya masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis adanya pengaruh parsial Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Menganalisis adanya pengaruh simultan Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Selain sebagai syarat kelulusan bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sumber literature dan dapat menjadi referensi untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademisi

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* secara simultan dan parsial terhadap *Tax Avoidance*.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.